

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam ilmu ekonomi dan pasar lebih dititikberatkan pada kegiatan jual belinya. Pasar dapat juga terbentuk di mana saja dan kapan saja dan syarat-syarat terbentuknya pasar yaitu: 1. Adanya penjual; 2. Adanya pembeli; 3. Adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan; 4. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar untuk mendekatkan jarak konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen (Azmil Kafrawi 2012). Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena sosial dalam masyarakat banyak ragamnya kadangkala fenomena sosial berkembang menjadi suatu masalah sosial akibat perbedaan cara pandang mengenai fenomena tersebut. Dalam menyelesaikan masalah sosial dibutuhkan suatu teori untuk menyelesaikannya. Teori-teori tersebut lahir dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap individu mengalami pengalaman yang berbeda maka teori yang muncul juga akan berbeda pula antara satu individu dengan individu lainnya. Disimpulkan bahwa tidak ada teori yang dapat menyeluruh membahas mengenai masalah sosial di masyarakat.

Di zaman modern ini, orang dengan berbagai aktivitas dan kepentingan silih berganti, kadang dapat membuat seorang individu atau suatu kelompok mengalami disjungsi atau persinggungan dengan individu atau kelompok yang lain yang akan mengakibatkan konflik. Konflik yang berkepanjangan kadang dapat memperburuk tatanan sosial masyarakat. Namun, konflik juga berperan positif dalam memperkuat persatuan dan menghilangkan konflik intern dalam suatu kelompok. Konflik di manapun bentuknya merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Konflik senantiasa ada dalam setiap sistem sosial. Dapat dikatakan konflik merupakan suatu ciri dari sistem sosial. Tanpa konflik suatu hubungan tidak akan hidup. Sedangkan ketiadaan konflik dapat menandakan terjadinya penekanan masalah yang suatu saat nanti akan timbul suatu ledakan yang benar-benar kacau. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. PKL, di satu sisi merupakan salah satu penggerak dalam perekonomian masyarakat pinggiran. Hutajulu (1985) memberikan batasan tentang sektor informal, adalah suatu bidang ekonomi yang untuk memasukinya tidak selalu memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, dan memerlukan surat-surat izin serta modal yang besar untuk memproduksi barang dan jasa.

Suatu kegiatan informal pada dasarnya harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (profit) yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin. Richardson (1991) berpendapat bahwa keputusan-keputusan penentuan lokasi yang memaksimumkan penerimaan biasanya diambil bila

memenuhi kriteria-kriteria pokok: 1. Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak; 2. Tempat yang luas lingkupnya untuk kemungkinan perluasan unit produksi.

Undang-undang yang bisa digunakan untuk melindungi para PKL dan masyarakat miskin pada umumnya, Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil: Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan.

Keberadaan pedagang kaki lima bagi masyarakat Arjasa sangat penting sebagai penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Arjasa dan Pasar terbesar yang ada di Kecamatan Arjasa, pasar tradisional dan sesudah pasar mengalami peremajaan di kabupaten Sumenep. Pedagang kaki lima sangat mempengaruhi pola pasar dan sosial di Arjasa. Dalam bidang perekonomian pedagang kaki lima hanya berpengaruh sebagai produsen yang penting bagi masyarakat Arjasa mengingat akan banyaknya masyarakat menengah maupun bawah. Mereka cenderung lebih memilih membeli pada pedagang kaki lima daripada membeli di supermarket, atau grosir maupun indogrosir yang banyak tersebar di Arjasa, dikarenakan harga yang mereka tawarkan lebih rendah. Pedagang kaki lima telah menjadi mata pencaharian utama sebagian warga Arjasa. Sehingga pedagang kaki lima telah menjadi salah satu sistem yang tidak dapat ditinggirkan masalahnya oleh pemerintah.

Kebijakan Otonomi Daerah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintahan di setiap daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang lebih memihak kepada rakyat. Sehingga pemerataan pembangunan sampai ke daerah pedalaman dapat dirasakan oleh masyarakat. Keleluasaan Pemerintah Daerah untuk mengurus dirinya sendiri tidak selamanya menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, di sebagian wilayah justru menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dengan terjadinya dominasi kekuasaan. Dominasi kekuasaan dalam pembangunan telah menimbulkan konflik vertikal antara dan investor di satu pihak dengan pedagang tradisional pasar Arjasa di pihak yang lain. Di mana, dominasi kekuasaan tersebut menimbulkan tindakan perlawanan dari pedagang.

Kepentingan individu berbeda dengan kepentingan masyarakat. Di mana kepentingan masing-masing individu berbeda-beda. Manusia tidak mempunyai tujuan yang sama. Meskipun ada kesamaan tujuan seringkali tidak ditempatkan pada tingkatan yang sama. Ini dikarenakan masing-masing individu secara tetap harus memilih di antara tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Namun tujuan yang paling dasar dari individu adalah usaha mempertahankan status dan prestise, menciptakan kenyamanan, keselamatan di dunia dan akhirat. Kepentingan masyarakat berbeda dengan kepentingan individu. Karena ketika menjadi anggota masyarakat kita diharuskan untuk mendefinisikan sebagai tujuan masyarakat bukan sebagai tujuan individu lagi. Dalam mendefinisikan tersebut tanpa melihat lagi atau memandang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bagi anggota-anggota individu bahkan sebagian mayoritas. Seringkali kelas yang dominan mempunyai pengaruh yang sangat besar, di mana mereka memiliki kekuatan

untuk menentukan arah terkoordinasi dari masyarakat. Sehingga tujuan-tujuan masyarakat adalah tujuan-tujuan dari kelas yang dominan tersebut (Anthony Brewer, 1999).

Perspektif ini berakar pada pemikiran Karl Marx yang membagi masyarakat atas dua kelas yakni kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis memiliki kapital untuk mengontrol alat-alat produksi, sedangkan kaum proletar hanya sebagai tenaga kerja. Kelas yang pertama memiliki kekuasaan, sedangkan kelas yang lain tidak memiliki kekuasaan. Kedua kelas ini selalu berada dalam kemungkinan untuk saling menguasai.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Konflik sosial sering terjadi karena adanya satu pihak atau kelompok yang kepentingan atau haknya dirampas oleh pihak atau kelompok lain dengan cara yang tidak adil. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Konflik antara pedagang kaki lima dan pemerintah setempat terjadi karena salah satu pihak memiliki kekuasaan dan perbedaan kepentingan antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Daerah.

Setelah melakukan observasi sebelum penelitian, banyak ditemukan konflik yang terjadi antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Daerah di Pasar Arjasa-Kangean. Hasil temuan observasi tersebut meliputi, banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mau dipindah atau diremajakan pasarnya, banyaknya aksi kekerasan oleh Pemerintah Daerah agar Pedagang Kaki Lima mau dipindah, adu mulut, dan konflik seperti itu masih berlangsung sampai sekarang.

Di samping itu konflik juga tidak terlepas dari dukungan dan desakan masyarakat setempat karena peremajaan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Konflik dari perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Daerah menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis dapat menarik sebuah rumusan masalah antara lain:

Bagaimana perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap rencana peremajaan Pasar Arjasa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlawanan yang terjadi pada Pedagang Kaki Lima terhadap rencana peremajaan pasar Arjasa.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penulisan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah untuk:

1.4.1. Teoritis

- a. Sebagai pengembangan disiplin ilmu sosiologi khususnya mengenai bentuk-bentuk perlawanan-perlawanan pedagang kaki lima.
- b. Untuk meningkatkan wawasan terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan pihak institusi terkait dalam mengambil suatu kebijakan.

1.5. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Beberapa peneliti terdahulu telah banyak yang meneliti tentang banyaknya kasus konflik atau perlawanan yang terjadi dalam bermasyarakat. Seperti yang pernah diteliti peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Bejamin, dan Bartoven Vivit N., dosen Prodi Sosiologi dari Universitas Lampung pada tahun 2008, dengan judul “Reaksi Wanita Pedagang Kaki Lima dan Strategi Adaptasi Terhadap Kebijakan Relokasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)”, dapat disimpulkan dari hasil penelitiannya adalah:

1. Dari 6 informan wanita Pedagang Kaki Lima menolak kebijakan relokasi pedagang karena dirasa lokasi relokasi tidak strategis.
2. Dari segi kebijakan relokasi hanya dilaksanakan untuk kegiatan penertiban saja, akan tetapi program yang dilaksanakan dapat berjalan akan bermanfaat secara jangka panjang sehingga kemudian dapat diterapkan penataan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan tanpa menggusur serta memberdayakan perekonomian.

Penelitian serupa yang berhubungan dengan konflik atau perlawanan juga pernah diteliti oleh Rahmawati (2012), mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dengan judul “Analisa konflik Sosial Nelayan Atas Batas Penangkapan

Ikan di Perairan Selatan Bangkalan Kecamatan Kwanyar”, kesimpulan dari penelitiannya adalah:

1. Konflik antar nelayan di Kecamatan Kwanyar dibagi menjadi 4 (empat), yaitu konflik kelas, konflik orientasi, konflik agraria, dan konflik primordial. Konflik kenelayanan di Kecamatan Kwanyar cenderung terbuka dan berbau kekerasan. Seperti pada beberapa kasus konflik nelayan Desa Batah dengan nelayan Lamongan, Sidoarjo, Bangil, nelayan Desa Kwanyar dengan nelayan-nelayan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pasuruan tahun ke tahun kuantitas dan kualitas konfliknya meningkat yang diperlihatkan dengan adanya tindakan kekerasan dan kejahatan antar komunitas nelayan.
2. Sebab konflik sosial nelayan atas keterbatasan lahan penangkapan ikan di pantai selatan Bangkalan Kecamatan Kwanyar adalah penggunaan alat tangkap yang tidak sama, pelanggaran jalur-jalur penangkapan ikan, pengaturan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan, kurang jelasnya hukum dan peraturan pemerintah dalam usaha penangkapan ikan, perbedaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat nelayan.

Jadi perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan Bejamin, dan Bartoven Vivit N serta Rahmati adalah jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Bejamin, dan Bartoven Vivit N., yakni membahas tentang reaksi pedagang kaki lima untuk menolak kebijakan relokasi dan penelitian Rahmawati membahas tentang konflik sosial yang terjadi antar komunitas nelayan yang ada di Perairan Selatan Bangkalan Kecamatan Kwanyar. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada deskripsi tentang bentuk-

bentuk perlawanan yang terjadi pada Pedagang Kaki Lima terhadap rencana peremajaan pasar Arjasa.

1.5.2. Kerangka Teori

1.5.2.1. Teori Perlawanan

Kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan Weber (Ritzer, 2000) merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah.

Soekanto dan Broto Susilo (1987) memberikan empat ciri gerakan sosial, yaitu:

- a. Tujuannya bukan untuk mendapatkan persamaan kekuasaan, akan tetapi mengganti kekuasaan.
- b. Adanya penggantian basis legitimasi.
- c. Perubahan sosial yang terjadi bersifat massif dan pervasive sehingga mempengaruhi seluruh masyarakat, Koersi dan kekerasan biasa dipergunakan untuk menghancurkan rezim lama dan mempertahankan pemerintahan yang baru.

Perlawanan merupakan bentuk dari pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat. Penyikapan masyarakat tersebut dalam bentuk perlawanan terhadap kelompok atau pihak yang dianggap mengancam eksistensi mereka selalu mengalami perubahan (Kusuma dan Agustina, ed., 2003). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh isu yang diangkat dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Soekanto (Kusuma dan Fitria, ed., 2003) berpendapat bahwa selama dasawarsa yang mendahului pemberontakan, kondisi-kondisi sosial dan ekonomi telah menimbulkan tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan berbeda dari sebelumnya. Kemudian Soekanto menambahkan, tuntutan tersebut disebabkan oleh masalah-masalah yang sifatnya kumulatif dan tidak terungkap yang merupakan sumber frustrasi bagi pemicu timbulnya perlawanan koordinasi sosial dan kekuasaan akan selalu dievaluasi oleh masyarakat (dalam pengertian) tentang kemampuannya memberikan perlindungan dan memelihara kedamaian serta ketertiban, sebaliknya masyarakat bertanggung jawab untuk tunduk dan mentaati kekuasaan yang berlaku. Apabila kewajiban timbal balik ini, menurut Hikam (Prisma, 1990), tidak dapat terpenuhi dengan baik akan menyebabkan terjadinya keberangan moral dan kerusakan sosial.

Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertindak laku karena ada dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Kepentingan ini sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Jika individu berhasil dalam memenuhi kepentingannya, maka ia akan merasa puas, dan sebaliknya kegagalan dalam memenuhi kepentingan ini akan banyak menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Dengan berpegang kepada prinsip bahwa tingkah laku individu merupakan cara atau alat dalam memenuhi kepentingannya, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu didalam masyarakat pada hakikatnya merupakan manifestasi pemenuhan dari dari kepentingan tersebut.

Pada umumnya secara psikologis dikenal ada dua jenis kepentingan dalam individu yaitu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial/psikologis. Oleh karena individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek pribadinya, baik jasmani maupun rohani, maka dengan sendirinya timbul perbedaan individu dalam hal kepentingannya. Perbedaan-perbedaan tersebut sekarang garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan dan lingkungan sosial sebagai komponen utama bagi bentuknya keunikan individu dalam hal kepentingannya meskipun dengan lingkungan yang sama. Sebaliknya lingkungan yang berbeda akan memungkinkan timbulnya perbedaan individu dalam hal kepentingan meskipun pembawaannya sama (Lindgren, 1980).

Perbedaan kepentingan itu antara lain berupa:

1. Kepentingan individu untuk memperoleh kasih sayang.
2. Kepentingan individu untuk memperoleh harga diri.
3. Kepentingan individu untuk memperoleh penghargaan yang sama.
4. Kepentingan individu untuk memperoleh prestasi dan posis.
5. Kepentingan individu untuk memperoleh kedudukan didalam kelompok.
6. Kepentingan individu untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan diri.
7. Kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan diri.

Kenyataan-kenyataan seperti itu menunjukkan ketidakmampuan suatu ideologi mewujudkan idealisme yang merupakan konsensus dari berbagai subideologi akhirnya akan melahirkan kondisi dis-integrasi atau konflik. Permasalahan utama yang jelas tampak dalam tinjauan konflik ini adalah adanya

jarak yang terlalu besar antara harapan (tujuan sosial) dengan kenyataan pelaksanaan dan hasilnya. Seperti itu disebabkan oleh cara pandang yang berbeda antara memerintah atau pengusaha sebagai pemegang kendali ideologi dengan berbagai kelompok kepentingan sebagai sub-sub ideologi (Fradhika virgantara. 2010/11).

Di sinilah tercerminkan adanya perbedaan kerangka tinjauan politik. Jika lebih terperinci kita melihat pola hubungan antara berbagai kelompok kepentingan sesuai dengan kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, maka akan tampak lagi adanya konflik di antara mereka yang disebabkan karena cara pandang mereka yang berbeda tentang satu masalah. Katakanlah tentang peran kelompok sosial dalam pembangunan negara, tentu saja kelompok agama, kelompok sosial, ahli-ahli ekonomi, para hartawan dan lain-lain akan melihatnya dari sudut kepentingan masing-masing kelompok tersebut. Jika lebih detail lagi kita perhatikan pola hubungan dalam satu kelompok, masih kita akan menemui adanya konflik intern yang disebabkan karena perbedaan kepentingan masing-masing individu dan kelompok itu akan sebagai akibat heterogenitas suatu kelompok (Mas' Oed, Mochtar, 1998).

Perbedaan kepentingan ini tidak secara langsung menyebabkan terjadinya konflik tetapi mengenal beberapa fase yaitu, (The British coouncil, 2001). Pertama, fase disorganisasi yang terjadi karena kesalahfahaman (akibat pertentangan antara harapan dengan standar normatif), yang menyebabkan sulitnya atau tidak dapatnya satu kelompok sosial menyesuaikan diri dengan norma (ideologi).

Kedua, fase disintegrasi (konflik) yaitu pernyataan tidak setuju dalam berbagai bentuk seperti timbulnya emosi massa yang meluap, protes, aksi mogok, pemberontakan dan lain-lain. Secara lebih teliti Walter T. Marti dan kawan-kawannya mengemukakan tahapan pertama disintegrasi sebagai berikut:

1. Ketidakefahaman anggota kelompok tentang tujuan sosial yang hendak dicapai yang semula menjadi pegangan kelompok;
2. Norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat lagi dalam mencapai tujuan yang telah disepakatinya;
3. Norma-norma dalam kelompok dan yang dihayati oleh kelompok bertentangan satu sama lain;
4. Sangsi sudah menjadi lemah bahkan sangsi tidak dilaksanakan dengan konsekuen lagi;

Pandangan sosiologi tentang disorganisasi dan disintegrasi tidak saja melahirkan konflik sosial, tetapi pada hal-hal tertentu dapat mengarah kepada integrasi kelompok maupun masyarakat.

Menurut Morgan (1966), sikap adalah kecenderungan untuk berespons baik sekarang positif atau negatif terhadap orang, obyek atau situasi. Sikap seseorang baru diketahui bila ia sudah bertindak atau bertingkah-laku. Oleh karena itu bisa saja bahwa sikap bertentangan dengan tingkah-laku atau tindakan. Jadi prasangka merupakan kecenderungan yang tidak tampak, dan sebagai tindak lanjutnya timbul tindakan, aksi yang bersifatnya realistik. Dengan demikian diskriminatif merupakan tindakan yang realistik, sedangkan prasangka tidak realistik dan hanya diketahui oleh diri individu masing-masing.

1.5.2.2. Penjelasan Konseptual

1.5.2.2.1 Konsep Perlawanan

Dalam kamus Bahasa Indonesia, perlawanan memiliki arti proses, cara, menangkis, atau bertahan. Tindakan perlawanan yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan bantuan aparat keamanan setempat diiringi tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang terjadi melibatkan aparat keamanan yang ditunjuk oleh pemerintah terkait pada saat pemerintah terkait akan memindahkan para Pedagang Kaki Lima dari pasar Arjasa yang lama ke pasar Arjasa yang baru. Hal ini mengakibatkan banyak pedagang kaki lima yang menjadi marah, karna tidak adanya sosialisasi sebelumnya dari pemerintah atau instansi pemerintah yang terkait kepada pedagang kaki lima, sehingga para pedagang kaki lima melakukan perlawanan seperti, menolak dipindahkan ketempat pasar yang baru, oleh pemerintah setempat, tidak mau berjualan di tempat yang baru, adu mulut sama pemerintah, ini disebabkan adanya interaksi antara pedagang kaki lima dan pemerintah yang terkait. Perlawanan dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 1. Perlawanan secara terbuka atau terang-terang menentang kebijakan tersebut melalui aksi unjuk rasa, mogok makan, dan pernyataan tertulis. 2. Perlawanan secara sembunyi atau tidak langsung melalui aksi mengumpat, merusak, tidak menempati pasar baru, tidak membayar retribusi perhari, dan tidak membayar uang sewa. Akhirnya muncullah konflik yang berkepanjangan sampai sekarang. Sedangkan fragmentasi dan intimidasi ditujukan kepada pedagang, bisa

kelompok atau individu oleh pemerintah dan aparat keamanan itu sendiri. Fragmentasi adalah cerita yang dibuat-buat sedangkan intimidasi merupakan tindakan menakut-nakuti, menggertak, ataupun mengancam terutama untuk memaksa orang atau pihak lain untuk berbuat sesuatu. Hal ini dilakukan agar para Pedagang Kaki Lima mau pindah dan menempati tempat yang sudah disediakan di Pasar Arjasa yang baru.

1.5.2.2.2 Peremajaan Pasar Arjasa

Suatu kegiatan informal pada dasarnya harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (profit) yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin. Richardson (1991) berpendapat bahwa keputusan-keputusan penentuan lokasi yang memaksimumkan penerimaan biasanya diambil bila memenuhi kriteria-kriteria pokok: 1. Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak; 2. Tempat yang luas lingkungannya untuk kemungkinan perluasan unit produksi.

peremajaan pasar arjasa karena tidak adanya lahan kosong yang cukup luas sebagai area parkir menyebabkan pengalokasian Pasar Arjasa, Kecamatan Arjasa hal ini tentu saja dapat menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan terutama pada jam-jam tertentu (terutama pagi saat aktivitas perjual belian). Jalan yang sudah ada kapasitasnya tidak terlalu besar dan terpotong untuk area parkir. Padahal jalan tersebut merupakan salah satu jalan local utama di Desa Arjas. Jika terus dibiarkan dengan melihat bahwa beberapa tahun kedepan jumlah pengguna jalan yang semakin bertambah maka akan mengakibatkan permasalahan

transportasi yang lebih semrawut dari pada saat ini. Dan terjadilah peremajaan atau pengalokasian pasar arjasa karena pasar terbesar yang ada di Kecamatan Arjasa, pasar tradisional, dan sesudah pasar mengalami peremajaan di Kabupaten sumenep. Kondisi interaksi antar pedagang yang baik terjadi karena para pedagang yang memiliki kesamaan nasib dan kebutuhan untuk tetap dapat menjalankan usahanya di Pasar Arjasa. Interaksi antar pedagang di Pasar Arjasa yang berjalan baik dapat menjadikan pemerintah lebih mudah mensosialisasikan programnya, namun disisi lain pedagang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Hal ini dapat berjalan positif ketika para pedagang yang memiliki inisiatif untuk meningkatkan citra Pasar Arjasa (untuk meningkatkan jumlah pengunjung pasar). Namun akan bernilai negative ketika program pemerintah misalnya rehabilitasi bangunan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang awalnya memberatkan namun sebenarnya untuk kebaikan bersama ditolak oleh para pedagang. Interaksi antara pedagang dengan pembeli di Pasar Arjasa terjalin dengan baik saat aktivitas transaksi misalnya tawar menawar. Banyak dari pembeli yang memang sudah menjadi pelanggan tetap pedagang di Pasar Arjasa, kondisi tersebut dapat menumbuhkan sikap saling menguntungkan dan bergantung antara penjual dengan pembeli. Sehingga transaksi yang berlangsung dapat dan sudah menjadi kebiasaan.

1.5.2.2.2. Beberapa Pandangan Mengenai Peran Konflik

Ada pertentangan pendapat mengenai perbedaan pandangan terhadap peran konflik dalam organisasi yang disebut oleh Robbin (1996: 431) sebagai *The Conflict Paradoks*, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat

meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

- a) Pandangan tradisional (*The Traditional View*). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah *violence*, *destruction*, dan *irrationality*. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan.
- b) Pandangan hubungan manusia (*The Human Relation View*). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi.
- c) Pandangan interaksionis (*The Interactionist View*). Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena

itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis-diri, dan kreatif.

Stoner dan Freeman (1989:392) membagi pandangan menjadi dua bagian, yaitu pandangan tradisional (*Old view*) dan pandangan modern (*Current View*):

1. Pandangan tradisional. Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang optimal, konflik harus dihilangkan. Konflik biasanya disebabkan oleh kesalahan manajer dalam merancang dan memimpin organisasi. Dikarenakan kesalahan ini, manajer sebagai pihak manajemen bertugas meminimalisasikan konflik.
2. Pandangan modern. Konflik tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain struktur organisasi, perbedaan tujuan, persepsi, nilai – nilai, dan sebagainya. Konflik dapat mengurangi kinerja organisasi dalam berbagai tingkatan. Jika terjadi konflik, manajer sebagai pihak manajemen bertugas mengelola konflik sehingga tercipta kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan bersama.

Selain pandangan menurut Robbin dan Stoner dan Freeman, konflik dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan kontemporer (Myers, 1993:234):

- 1) Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari.
- 2) Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antarpribadi bahkan merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun organisasi tersebut, misalnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi.

Berdasarkan penjabaran pandangan-pandangan di atas, ada dua hal penting yang bisa disorot mengenai konflik:

1. Konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Hal ini dimaksudkan apabila kita ingin mengetahui konflik berarti kita harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi. Semua konflik mengandung

komunikasi, tapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang buruk. Menurut Myers, Jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, maka dalam proses itu, pasti ada konflik (1982: 234). Konflik pun tidak hanya diungkapkan secara verbal tapi juga diungkapkan secara nonverbal seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentangan (Stewart & Logan, 1993:341). Konflik tidak selalu diidentifikasi sebagai terjadinya saling baku hantam antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga diidentifikasi sebagai ‘perang dingin’ antara dua pihak karena tidak diekspresikan langsung melalui kata-kata yang mengandung amarah.

2. Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tapi bisa menjadi sumber pengalaman positif (Stewart & Logan, 1993:342). Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam manajemen suatu kelompok atau organisasi. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tetapi juga memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan pihak-pihak yang terkait. Pelajaran itu dapat berupa bagaimana cara menghindari konflik yang sama supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan bagaimana cara mengatasi konflik yang sama apabila sewaktu-waktu terjadi kembali.

Masyarakat dipandang sebagai statis; selalu mengutamakan integrasi, ketertiban dan stabilitas. Kalau masyarakat berubah, perubahan itu berwujud penyesuaian terhadap lingkungannya. Equilibrium masyarakat selalu dalam

keadaan yang diliputi perubahan dan pertikaian. Konflik yang terjadi itu merupakan kekuatan dinamik masyarakat. Tanpa ada konflik kepentingan, masyarakat tidak akan bermakna. Sumber dinamika masyarakat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial tidak bisa dielakkan, perubahan terjadi secara bertahap. Perubahan terjadi akibat konflik antara kelompok yang saling bersaing tetapi masih dalam tertib kelembagaan. Perubahan yang terjadi tidak sampai mengganggu kestabilan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti dengan cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono. 2010:1)

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan penekanan pada deskriptif dan analitis. Bogdan dan Taylor (Lexy Moleong, 2000) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata (baik tertulis maupun lisan) dan

pelaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden serta lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2000).

Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini peneliti berniat untuk meng gambarkannya dalam bentuk penelitian ilmiah, apalagi konflik seperti ini telah terjadi beberapa kali pada saat Pemerintah Kota melakukan peremajaan pasar-pasar tradisional yang ada di Kelurahan Arjasa Kecamatan Arjasa Kota Sumenep. Sedangkan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*) tunggal, yakni suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Penelitian ini berupaya untuk menyingkapkan tabir kemarjinalan kasus peremajaan pasar tradisional yang melibatkan pihak pemerintah. Untuk konteks Arjasa sendiri, penelitian seperti ini masih dianggap sebagai hal tabu untuk diangkat, karena bersinggungan langsung dengan kekuasaan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui: wawancara mendalam atau indept interview, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi.

Wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi berfungsi sebagai data primer, sedangkan dokumen-dokumen berfungsi sebagai data sekunder.

1.6.2.1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur, sesuai dengan urutan wawancara, dan tidak memakai sistem angket atau kuesioner. Teknik wawancara mendalam berguna untuk memperoleh data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan untuk mendapatkan penafsiran yang utuh tentang suatu informasi. Untuk memperoleh validitas data, wawancara dilakukan secara berulang terhadap informan yang berbeda dengan item atau masalah yang sama. Dengan demikian, diharapkan data-data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya (K. Yin, 2003). Penelitian ini menggunakan dua tipe wawancara, yaitu: wawancara yang bertipe open-ended dan wawancara terfokus. Wawancara openended dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada informan kunci tentang suatu peristiwa tertentu dan opini atau pendapat mereka tentang hal tertentu tersebut. Seperti pendapat pedagang (secara individu) tentang pihak pemerintah, investor, ataupun tentang masyarakat Arjasa khususnya Kelurahan Arjasa Kecamatan Arjasa.

Sedangkan wawancara terfokus dilakukan dalam jangka waktu terbatas (satu jam atau dua jam), walaupun masih bersifat open-ended tetapi tidak mengikuti serangkaian daftar pertanyaan tertentu dari protokol wawancara yang telah disiapkan. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan data pendukung terhadap fakta-fakta tertentu (K. Yin, 2003). Dengan teknik ini, peneliti dapat

memperoleh komentar-komentar yang segar dari informan tentang sesuatu hal yang mendukung data.

Dalam penelitian ini informan yang menjadi informan kunci adalah, pedagang dan dinas yang mengerti tentang kondisi pasar sedangkan informan pendukung adalah 1. Camat Arjasa; 2. Kepala Desa Arjasa; 3. Tokoh Masyarakat; 4. Masyarakat setempat; dan 5. Penjaga Keamanan pasar yang setiap hari ada di pasar.

1.6.2.2. Metode Observasi partisipan

Observasi adalah teknik atau cara pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala alam (Kartono, 1996). Menurut Faisal (2001), pengamatan dapat juga dilakukan terhadap benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses, dan penampilan tingkah laku seseorang.

Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung (K. Yin, 2003). Di mana peneliti melakukan kunjungan langsung ke lapangan berkaitan dengan perilaku atau kondisi lingkungan yang relevan dengan maksud penelitian ini sebagai tambahan dimensi-dimensi baru dalam konteks memahami fenomena yang diteliti tersebut.

1.6.3. Sumber Data

1.6.3.1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), data primer secara khusus di kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.

Data primer dapat berupa pendapat seseorang secara individual atau kelompok, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data dengan yang diinginkan karena data yang tidak relevan dengan tujuan peneliti dapat di rugikan. Ada tiga metode yang dapat dikumpulkan data primer yaitu dengan metode observasi, metode wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling, dan snowball sampling, dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau kemungkinan dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti, (sugiyono, 2010: 218-219).

Purposive dapat diartikan sengaja. Maksudnya adalah cara menentukan sampel dengan sengaja. Atau teknik sampling purposive bisa diartikan sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel, atau orang yang benar-benar berjualan lama di pasar arjasa. Dalam kasus perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap peremajaan pasar yang terjadi di Desa Arjasa ini

menggunakan teknik sampling purposive yaitu, dengan alasan kenapa saya mengambil 5 orang pedagang dari sekian banyak PKL, menurut saya orang yang benar-benar mempunyai kriteria, yaitu 1. Yang telah lama berjualan atau senior, lebih dari lima tahun 2. Yang dianggap paling tahu informasi, tentang peremajaan pasar 3. Yang dianggap berpengaruh terhadap pedagang lain, yang dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.: Teknik sampling purposive pada penelitian

No.	Stakeholder	Level	Sasaran	Teknik
1	Pedagang Kaki Lima di Desa Arjasa-Kangean (5 orang)	<i>Community</i>	Pedagang Kaki Lima	Wawancara
2	Tokoh masyarakat (Sesepuh Desa yang dituakan)	<i>Community</i>	Tokoh Desa Arjasa	Wawancara
4	Pemerintah daerah dan staff (tingkat Desa) Di wakili 3 Orang	<i>Supra-Community</i>	Kepala Desa Arjasa, staff yang menaungi pasar	Wawancara

1.6.3.2. Data Sekunder

Data sekunder menurut S. Nasution adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya.

1.6.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman yang menyatakan ada tiga proses analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2006:65).

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari bahan-bahan tertulis di lapangan maupun hasil-hasil wawancara mendalam yang dilakukan. Data tersebut berupa data primer (data wawancara mendalam dari subyek penelitian) dan data sekunder (data dari berbagai referensi buku).

Penyajian data merupakan proses memaparkan informasi yang diperoleh secara sistematis dan menyeluruh. Data yang di dapatkan dari lapangan melalui wawancara mendalam terhadap para Pedagang Kaki Lima (subyek utama) dan dinas terkait serta subyek pendukung masyarakat (pembeli) dan tokoh masyarakat Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa-Kangean di paparkan secara sistematis dan menyeluruh sehingga nanti ditemukan satu titik kesimpulan.

Terakhir, penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan interpretasi peneliti. kegiatan analisis yang lebih spesifik pada proses penafsiran data yang sudah disajikan.

1.6.4.1. Catatan Lapangan

Pencatatan lapangan dilakukan agar informasi di lapangan tidak tercampur dengan informasi lain karena ingatan seseorang itu sifatnya terbatas. Catatan lapangan berguna untuk alat perantara antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan diraba. Catatan itu baru dirubah ke dalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah penelitian tiba di rumah. Proses itu dilakukan setiap kali selesai mengadakan pengamatan dan wawancara (Moelong, 2006:153).

1.6.5. Metode Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terdapat pada hasil penelitian ialah valid, reabel, dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan, data yang valid adalah data yang tidak berbeda, antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek, apabila dalam obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah, dan apabila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2010:267).

1.6.5.1 Metode Triangulasi

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin, ke atas yang menguasai, dan ketemanya yang merupakan kelompok kerjasama.

Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber tersebut (Sugiyono, 2010: 274).

1.6.6. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini diadakan pasar Arjasa Jl. Arjasa di Kelurahan Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Dipilihnya lokasi ini karena beberapa pertimbangan, diantaranya:

1. Lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki pasar tradisional yang cukup besar dan telah berdiri sejak awal tahun 2012, dengan mayoritas pedagang yang memiliki modal ekonomi menengah ke bawah.
2. Merupakan pusat ekonomi menengah ke bawah sehingga sangat sesuai bagi terjadinya konflik vertikal, dan
3. Lebih mudah dijangkau dan dekat dengan akses informasi lainnya, yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dibatasi pada jangka waktu tertentu dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian tentang konflik vertikal yang belum usai sampai sekarang. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam memahami permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dan untuk memberikan peluang kepada peneliti-peneliti selanjutnya melakukan penelitian.

Data-data yang dianalisa dibatasi pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi data yang didapat pada waktu itu. Penelitian ini dibatasi pada data- data yang berkaitan dengan dominasi kekuasaan, perlawanan, dan resolusi yang terjadi dari awal tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Oleh sebab itu, penelitian hanya mengungkapkan bentuk-bentuk dominasi kekuasaan, bentuk-bentuk perlawanan pedagang (PKL), dan upaya resolusi konflik yang terjadi di Kecamatan Arjasa dari awal tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 yang berkaitan dengan peremajaan pasar tradisional menjadi pasar modern.

Tabel 2: Jadwal Penelitian

[illegible]